BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah fasilitas pemerintah yang dibuat untuk membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan sebelum mereka dapat kembali bergaul dengan masyarakat. Keadaan yang aman di lapas tentunya akan menjadi sangat penting agar berbagai aktivitas pembinaan kepada para penghuni Lapas ini tidak terganggu. Jika rasa aman yang seharusnya didapatkan oleh penghuni Lapas di tempat ini tidak bisa diwujudkan, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul adanya ancaman bagi para penghuni lapas tersebut. Meskipun pada dasarnya para penghuni Lapas ini telah kehilangan kemerdekaannya sebagai bentuk tanggungjawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang pernah dilakukannya, narapadiana juga masih memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan jiwanya ketika berada di dalam lingkungan lapas. Jangan sampai, tujuan utama lapas sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum dapat dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sistem pengamanan dan penyelamatan yang baik.

Pengamanan dan penyelamatan lapas adalah upaya untuk menciptakan keadaan lapas yang terbebas dari berbagai gangguan, baik fisik maupun psikis untuk menjamin keselamatan jiwa para penghuni Lapas yang tinggal di sana.¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹Haris Syaputra, 2021, *Melindungi Hak Penghuni Lapas Di Lapas Kelas IIA Kota Padang Saat Terjadi Gempa*, Universitas Andalas, Padang, h. 2

Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas dan Rutan (disingkat Permenkumham No. 33 Tahun 2015) yaitu keamanan dan penyelamatan Lembaga Kemasyarakatan merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh satuan pengamanan Lapas dalam kaitannya dengan pencegahan, pemantauan, penyelesaian dan pemulihan situasi di lingkungan Lapas. Munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, tujuan dari tindakan pengamanan di Lapas pada hakekatnya adalah untuk membuat penghuni Lapas merasa aman.

Tindakan pengamanan digunakan dalam mencegah kejadian kekerasan sesama napi di Lapas. Setiap penjara biasanya memiliki aturannya sendiri, tetapi mereka tetap memiliki tujuan sama dengan yang lain. Tata tertib pemenjaraan yang harus dipatuhi oleh setiap penghuni Lapas adalah tata tertib Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, termasuk di dalamnya memenuhi setiap program yang ditetapkan. Agar tujuan pendidikan itu terwujud bagi warga, yaitu untuk melihat kesalahan mereka dan memperbaiki agar mereka tidak kembali melakukan kejahatan setelah hukuman di lapas.

Pelaksanaan fungsi pengamanan harus menjadi tanggung jawab pegawai di lapangan. Seorang sipir, juga disebut sipir, adalah orang yang ditugaskan untuk mengawasi, mengamankan, dan melindungi penghuni Lapas yang dipenjara. Ranger adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai pejabat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengamanan dengan tindakan berlebihan yang mengabaikan hak-hak fundamental berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban di Lapas. Keseimbangan antara

keamanan dan proses integrasi sosial, terutama kepentingan para penghuni Lapas, harus menjadi perhatian utama para penjaga. Hal ini membutuhkan kesadaran, ketrampilan dan tanggung jawab yang besar dari para sipir untuk mendidik dan membimbing penghuni Lapasnya.

Penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak terpidana, yang dilakukan dengan cara mengeluarkan yang bersangkutan dari dalam penjara dengan memaksanya untuk mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam penjara dan yang berkaitan dengan penjara. tindakan reguler terhadap mereka yang melanggar aturan ini. Di sisi lain, tugas pokok dan tugas lembaga pemasyarakatan juga meliputi pelaksanaan pidana, penahanan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan. Sistem seperti itu sesuai dengan filosofi reintegrasi sosial, dimana kejahatan adalah konflik yang terjadi antara penghuni Lapas dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan konflik atau mengintegrasikan kembali terpidana ke dalam komunitasnya (reintegrasi).² Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala dan hambatan di lapangan. Faktanya, sarana dan prasarana penjara selalu terbatas membuat para sipir di lapangan tidak dapat melakukan pengelolaan lapas secara efisien. Selain itu, kurangnya dana yang di turunkan oleh pemerintah untuk manajemen lapas juga membuat berbagai fasilitas lapas menjadi dirasa masih sangat minim.

Meningkatnya populasi penghuni Lapas juga telah mengakibatkan kepadatan dalam fasilitas pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Salah satu harian online Indonesia melaporkan terdapat sembilan lapas kelas II yang

² P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Pemasyarakatan Indonesia*, Armico, Bandung, h. 56.

memiliki peningkatan populasi penghuni Lapas hingga lebih dari 200%, seperti Lapas Api Kelas II A dan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan Riau, Lapas Kelas II Beureun, Lapas Kelas II B Idi, Lapas Kelas II B Loksukon dan Lapas Kelas II B Kutacane Aceh, Lapas Kelas II A Banjarmasin dan Lapas Kelas II B di Balikpapan, Kalimantan dan Lapas Kelas II B di Tebing Tinggi Del, Sumatera Utara. di lapas kelas I, Lapas Tangerang menjadi salah satu lapas dengan penghuni Lapas hingga 400%.³

Overcrowding pemasyarakatan merupakan faktor yang meningkatkan bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat seperti bencana yang dapat terjadi di lingkungan penjara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat akibat perpaduan antara faktor alam, faktor non alam, dan faktor penyebab gangguan dan kehidupan manusia. Kebakaran adalah salah satu bencana paling umum di penjara, dan telah merenggut nyawa ratusan orang narapidana yang menghuni lapas tersebut. Kebakaran pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan teknologi, dimana kebakaran disebabkan oleh faktor desain, operasional, kelalaian, atau kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri.

Potensi bahaya kebakaran di lembaga pemasyarakatan apabila dikombinasikan kurangnya kesiapsiagaan di penjara serta kurangnya sumber daya yang diperlukan dapat mengakibatkan risiko bahaya cedera tidak hanya bagi para tahanan namun juga bagi keselamatan publik. Oleh karena itu, Hal ini penting

³<https://nasional.tempo.co/read/1517981/napi-narkoba-dominating-penghuni-lapas-di-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2022

untuk diperhatikan dalam penanggulangan kebakaran khususnya pada fasilitas pengadilan, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat di dalam Lapas yang rentan terhadap viktimisasi karena Lapas merupakan bangunan yang didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat yang berada di dalamnya tidak dapat keluar. Oleh karena itu, jika terjadi kebakaran, diperlukan kebijakan dan tindakan untuk melindungi penghuni Lapas yang ditahan dan berbagai arsip penting di gedung penjara. Oleh karena itu, potensi bahaya kebakaran di lapas akan berdampak pada munculnya risiko keselamatan tidak hanya untuk penghuni Lapas, tetapi juga untuk keselamatan publik.

Ketika terjadi bencana seperti kebakaran, Perlindungan Penghuni Lapas di Lapas diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Keamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan upaya pengamanan di Lapas. menyebutkan bahwa keselamatan dan perlindungan penghuni Lapas menjadi tanggung jawab Tim Penyelamat Penghuni Lapas. Situasi khusus seperti kebakaran memang membutuhkan penanganan khusus yang cepat, efisien dan efektif untuk menjamin keselamatan jiwa tawanan. Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Keamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara juga menjelaskan bagaimana SOP yang diterapkan di Lapas untuk menerapkan pengamanan dan keamanan penghuni Lapas jika terjadi kebakaran, termasuk pembukaan kamar dan pembebasan penghuni Lapas. ke tempat terbuka yang aman para penjaga.

Faktanya di lapangan menunjukkan setidaknya tercatat sebanyak 13 kali kebakaran hebat terjadi di beberapa lapas di Indonesia dalam tiga tahun terakhir

(2019-2021), termasuk 10 lapas yang kelebihan kapasitas. Dan yang lebih menyedihkan lagi kebanyakan penjara tidak pernah memberikan simulasi kebakaran kepada penghuni Lapas sehingga kematian tidak dapat dihindari. Juga, kebakaran lapas terbaru terjadi pada 8 September 2021 di lapas kelas I Tangerang. Kebakaran tersebut merenggut 49 nyawa, 40 diantaranya meninggal dunia seketika di rutan Blok C2, sedangkan korban lainnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan saat dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang.⁴

Penanganan terhadap bencana kebakaran di lapas masih menjadi kendala yang sulit diatasi oleh manajemen lapas, sehingga pelaksanaan pengamanan dan perlindungan penghuni Lapas di lapas masih belum dapat dilakukan secara efisien. Ada banyak sekali faktor yang membuat sistem manajemen lapas cenderung mengalami penurunan kualitas dari tahun ke tahun. Selain manajemen SDM di lapas, pengembangan fasilitas dan dukungan pembiayaan dari pemerintah, usia lapas juga akan mempengaruhi seberapa fatal bencana kebakaran dapat mengakibatkan korban jiwa, karena sangat menentukan kecepatan evakuasi, kecukupan kapasitas ruang/tempat aman tertentu dari penjara dan strategi untuk mengurangi jumlah penghuni yang berisiko bencana kebakaran.

Berawal dari permasalahan *overcapacity*, manajemen lapas kemudian menghadapi banyak sekali kendala untuk mencapai kelayakan dalam hal pembinaan, pelayanan, pengamanan, hingga keselamatan bagi para penghuninya karena fasilitas yang dimiliki lapas di Indonesia sangat minim. Tidak hanya karena kurangnya perhatian pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk

⁴<https://news.detik.com/berita/d-5943667/cases-kebakaran-lapas-tangerang-ex-kalapas-untung-never-there-simulation>, diakses 24 Mei 2022

mengembangkan fasilitas lapas yang ada di Indonesia, tetapi juga karena jika dilihat dari usianya, banyak lapas di Indonesia dirasa memiliki bangunan yang sudah uzur usianya.⁵

Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Cipinang, Jakarta Timur terbakar pada 26 November 2005. Kebakaran mengakibatkan seorang napi tewas, dan empat lainnya mengalami luka bakar. Petugas Lapas Cipinang mengungkapkan bahwa korban yang mengalami luka bakar dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Kebakaran diduga disebabkan oleh ledakan kompor minyak.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyajikan sebuah penelitian yang berjudul “pengamanan dan penyelamatan penghuni lapas dari bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.”

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan penghuni Lapas dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana Karakteristik prosedur pengamanan dan penyelamatan penghuni Lapas dari bencana kebakaran pada lembaga pemasyarakatan?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisa penanganan bagi penghuni Lapas dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/08211991/penjara-terbakar-salah-siapa>, diakses tanggal 24 Mei 2022.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-487027/lp-narkoba-cipinang-terbakar-1-napi-tewas>, diakses tanggal 24 Desember 2022

2. Untuk memahami dan menganalisa karakteristik prosedur pengamanan dan penyelamatan penghuni Lapas dari bencana kebakaran pada lembaga pemasyarakatan.

IV. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum acara dalam penanganan penghuni Lapas terkait pengamanan dan penyelamatan dari bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan serta dapat menjadi sumber data dan referensi bagi semua kalangan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penanganan penghuni Lapas penghuni Lapas dalam pengamanan serta penyelamatan dari bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.

V. Kerangka Konseptual

1. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yaitu *Legal Protection* dan *Rechtsbecherming* dalam bahasa Belanda. Ungkapan ini memiliki arti adanya penggunaan sarana hukum atau perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan melindungi kepentingan suatu subjek hukum, melalui konversi

kepentingan-kepentingan si subjek hukum menjadi sebuah hak hukum yang perlu dilindungi.⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang berbentuk *preventif* (mencegah terjadinya pelanggaran hukum) ataupun *represif* (penyelesaian hukum akibat terjadinya pelanggaran hukum), baik tertulis maupun tidak tertulis, bertujuan untuk melindungi subjek hukum. Hal inilah yang membuat perlindungan hukum merupakan sebuah fungsi yang menggambarkan hukum, dimana kedamaian, ketertiban dan keadilan menjadi tujuan utama dalam hukum.⁸

Perlindungan hukum diwujudkan menjadi suatu bentuk upaya atau tindakan yang pada hakikatnya adalah untuk memberi perlindungan suatu golongan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemangku kekuasaan yang dalam praktiknya berlawanan dengan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tetap hak untuk menikmati ketentraman dalam kehidupannya bernegara.⁹

Pada Pasal 28 UUD 1945 huruf G disebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan ungkapan hak atas rasa aman dan perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada orang perseorangan

Pada ayat 1 Pasal 28 UUD 1945 menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan bagi seorang individu, tetapi juga bagi keluarganya, kehormatannya, martabatnya, serta harta benda yang

⁷ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, h. 357.

⁸ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan Pokok UU Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 30.

⁹Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 18.

dimilikinya, termasuk perlindungan untuk memastikan bahwa individu tersebut mendapatkan terbebas dari ketakutan untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada ayat 2 Pasal 28 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa perlindungan hukum juga diberikan untuk memastikan seseorang dilindungi dari suatu perbuatan menyiksa serta perbuatan lainnya yang mengakibatkan jatuhnya derajat dan martabatnya sebagai manusia, dan dapat meminta suaka dari politik di luar negaranya untuk mendapatkan perlindungan tersebut.

Undang-undang lain yang menjelaskan perlindungan hukum, khususnya untuk mendapatkan rasa aman, dijelaskan dalam dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, hidup damai, aman, tenteram, terhormat, dan terlindungi merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum menunjukkan suatu bentuk hukum yang menunjukkan manfaat dan manifestasi adanya kepastian hukum baik secara preventif maupun preventif menurut peraturan yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

2. Narapidana

Narapidana sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman, dan menetap di bui untuk menjalani hukuman tersebut, karena telah dibuktikan di muka sidang bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

¹⁰Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Utama Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Sasaran Pers, Surabaya, h. 53.

Narapidana menurut J Elias Simon adalah setiap orang yang ditahan atau dipenjara dengan alasan tuduhan pidana terhadapnya, yang ditahan baik dalam penjagaan polisi ataupun lembaga pemasyarakatan, baik yang belum dijatuhi hukuman maupun sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan sesuai pidana yang dilanggar.¹¹

Narapidana adalah masyarakat umum yang diputuskan telah melakukan pelanggaran suatu norma hukum yang berlaku, sehingga orang tersebut harus dipisahkan dari masyarakat untuk mendapatkan hukuman berdasarkan keputusan hakim.¹²

Narapidana juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana yang dimaksud dengan penghuni Lapas merupakan adalah seseorang yang dipidana oleh pengadilan sehingga haknya hilang selama penangkapan (lapas).

Berdasarkan Pasal 1 Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Keamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara, narapidana adalah orang yang kehilangan kemerdekaan dan hukumannya. bertugas di penjara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menjalani hidupnya di dalam penjara sesuai keputusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

¹¹Josias Simon, A.R. dan Thomas Sunaryo, 2018, *Kajian Budaya Lapas di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, h. 59.

¹²Harsono, C.I., 2021, *Sistem Pembangunan Lapas Baru*, Djangan, Jakarta, h.36.

3. Pengamanan dan Penyelamatan Lembaga Pemasyarakatan

Pengamanan berasal dari kata *safe*, artinya keadaan dimana tidak ada bahaya untuk tujuan penyelamatan. Sedangkan penyelamatan berasal dari kata *selamat*, yang menunjukkan adanya upaya untuk melakukan penyelamatan kepada seorang korban atau hartanya.¹³

Pengamanan dan penyelamatan lapas dalam konteks yang paling dasar, yaitu sebagai upaya melindungi wilayah lapas secara keseluruhan, baik unsur manusia dan unsur non manusia, dengan menggunakan berbagai kekuatan yang terorganisir.¹⁴

Pengamanan dan penyelamatan lapas adalah upaya untuk menciptakan keadaan lapas yang terbebas dari berbagai gangguan, baik fisik maupun psikis, sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa para penghuni Lapas yang tinggal di dalamnya.¹⁵

Pengamanan dan penyelamatan lapas menurut Pasal 1 Permenkumham No. 33 Tahun 2015 adalah berbagai kegiatan satuan pengamanan lapas dalam rangka mencegah, menindaklanjuti, menanggulangi dan memulihkan situasi di lingkungan lapas akibat munculnya gangguan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengamanan dan penyelamatan lapas merupakan upaya penggunaan kekuatan untuk melindungi bangunan lapas serta orang-orang yang ada didalamnya dari

¹³Umar Anwar, 2021, *Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar: Teknik Pengamanan*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, h.13.

¹⁴*Ibid*, h.14.

¹⁵*Ibid*, h.16.

berbagai ancaman yang membahayakan fisik maupun psikis, sehingga dapat tercipta situasi yang aman di lapas.

4. Bencana kebakaran

Bencana kebakaran berarti bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia yang menyebabkan terbakarnya sesuatu, misalnya: rumah, gedung atau hutan, dimana kobaran api yang besar dapat mengakibatkan hilangnya harta benda atau nyawa orang yang berada di lokasi terjadinya bencana kebakaran tersebut.¹⁶

Kebakaran sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa terbakarnya suatu bangunan atau lingkungan lainnya, baik karena hubungan pendek arus listrik, percikan api, puntung rokok, atau bahkan panas matahari yang membakar salah satu titik di wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian berupa hilangnya nyawa atau harta benda lainnya.¹⁷

Kebakaran sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh nyala api, baik kecil maupun besar, di tempat yang tidak diinginkan, yang umumnya sukar dikendalikan dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau harta benda lainnya.¹⁸

¹⁶Arie S Priambodo, 2009, *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, Kansius, Yogyakarta, h.5.

¹⁷ Rigen Adi Kowara & Tri Martiana, 2017, Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Penelitian di PT. PJB UP Brantas Malang), *Jurnal Yayasan Manajemen Kesehatan RS Dr. Soetomo*, 3(1), h.70-85.

¹⁸ Lies Rahayu Wijayanti Faiid et al., 2018, *Handbook on Mitigation and Control of Forest and Landfires*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Jakarta, h. 1.

Kebakaran sebagai suatu kejadian sebagai akibat dari munculnya api yang tidak dapat dikontrol, baik disebabkan karena terjadi listrik yang korslet, puntung rokok, atau bahan kimia lainnya yaitu panas, udara dan bahan bakar.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut, api mengacu pada bencana yang terjadi yaitu kebakaran merupakan suatu bencana kemunculannya berasal dari percikan api akibat adanya reaksi kimia antara panas, udara dan bahan bakar, terjadi titik-titik yang tidak dikehendaki sehingga membuat kobaran api menjadi sulit dikendalikan dan berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa atau harta benda lainnya.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan atau disebut lapas adalah suatu sistem yang dibuat untuk memperlakukan penghuni Lapas melalui pengayoman dan pemberian bekal kepada orang yang dianggap menjalani kehidupan yang sesat, sehingga dapat kembali dengan kemampuan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik setelah kembali menjadi anggota masyarakat.²⁰

Lapas sebagai tempat dimana segala aktivitas dalam wilayah tersebut ditujukan untuk memberi pembinaan kepada para narapidana sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.²¹

¹⁹ K. Ima Ismara, 2018, *Pedoman K3 Kebakaran*, UNY, Yogyakarta, h.9.

²⁰ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 2.

²¹ Dwijaya Priyanto, 2006, *Sistem Penegakan Lapas Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.105.

Lapas dapat diartikan sebagai tempat dibinanya orang-orang yang secara hukum telah terbukti melakukan pelanggaran dan mendapatkan hukuman tertentu sehingga dikirim ke tempat ini untuk mendapatkan bimbingan agar pelaku mendapatkan pengalaman berharga atas tindakan kejahatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama ketika kembali ke masyarakat.²²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mendefinisikan penjara sebagai tempat pembinaan penghuni Lapas.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, terdapat tiga hal penting yang menjelaskan definisi lapas, yaitu adanya penghuni Lapas yang menempati wilayah tersebut, adanya pembinaan yang diberikan kepada penghuni Lapas selaku orang yang tinggal di wilayah tersebut, dan adanya harapan bahwa pengalaman penghuni Lapas di dalam lapas dapat menjadi faktor yang mendorongnya untuk tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum ketika kembali ke masyarakat.

VI. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian menggunakan peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya,

²² M. Zen Abdullah, 2007, *Keberadaan Lapas dan Efektifitasnya dalam Rehabilitasi Penghuni Lapas*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, h. 48.

sehingga analisis penelitian normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan.²³

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

²³ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum:Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, h.20.

5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Buku ilmiah di bidang hukum;
- 2) Kumpulan makalah;
- 3) Jurnal; dan
- 4) Artikel ilmiah;

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus; dan
- 2) Website.

3. Metode pengumpulan Bahan Hukum atau Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum yang tertulis dengan pendekatan analisis konten.²⁴

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dimana peneliti melakukan pengelompokan dan seleksi data yang didapat selama pengumpulan bahan hukum, dan kemudian

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 87.

menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti, Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi.²⁵

VII. Pertanggungjawaban Sistematis

Kajian ini dibagi menjadi empat bab dengan topik sebagai berikut.

- a. Bab I berisi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, alat penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian sebagai gambaran umum yang merangsang peneliti untuk melakukan penelitian pada topik yang merangsang peneliti untuk melakukan penelitian.
- b. Bab II menjelaskan bagaimana penanganan hukum bagi penghuni Lapas dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.
- c. Bab III menjelaskan bagaimana prosedur pengamanan dan penyelamatan penghuni Lapas menurut Permenhukam No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Fasilitas Lapas dan Rutan Negara.
- d. Bab IV menjelaskan kesimpulan dan saran.

²⁵*Ibid*, h. 105.